

RSPO

Roundtable on Sustainable Palm Oil

ROUNDTABLE MEETING ON SUSTAINABLE PALM OIL

Steps in Addressing Traceable FFB by Wilmar Group

By Simon Siburat – GM Group Sustainability Wilmar International Limited



SUSTAINABILITY
WHAT'S NEXT?



6 Main Sources of FFB Received in a Mill

- Owned Estates
 - Companies
 - Small Producers
 - Schemed Smallholders
 - Independent smallholders
 - Agents/Collecting Centers
- External



Legal Requirement for Companies and Small producers

- Land title from land and survey Department
- Trading License
- Seedling Certificate from a Licensed Nursery
- MPOB License to transport and to sell FFB, **Agent will be to Buy and Sell FFB**



- Tax Reference no. (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
- Letter of Registration (Surat Keterangan Terdaftar.)
- Registrar of Company (Tanda Daftar Perusahaan)
- Business Permit (Surat Izin Usaha Perdagangan)



Legal Requirement for Schemed mall holders smallholders

- Land Title from BPN (SHM) or Surat Keterangan Tanah or Surat Pengakuan Hak (User Rights)
- Legality of Plasma Co-operatives
 - AKTA – Written by a Notaris and will include the name of the Co-operatives, Address, Registration of Ownership, Type of business and amount of investment
- Bupati Decree (SK) to determine the plasma members
- Memorandum of Agreement between company, Bank and plasma co-operatives.



Legal Requirement for Independent smallholders

- Land title from Land and Survey Department
- Identity Card of Owners
- Seedling Certificate from a Licensed Nursery
- MPOB License to transport and to sell FFB



- Land Title from BPN (SHM) or Surat Keterangan Tanah or Surat Pengakuan Hak (User Rights)
- KTP Pemilik



Management System

- Clear policy from Managing Director to buy only legal FFB from a known source
- A clear Standard Operating Procedures on FFB Procurement
- An agreement between Supplier or Agent or Individual and Company.

Content of Agreement

- Renewable every 6 month
- FFB come from a legal source which means, from a farm which is not part of a forest reserve or protected areas or illegally harvested from someone's farm or property or stolen crop.
- Grant permission for the company to verify the source of FFB.
- If there is a breached of the agreement, the company has the right to refuse buying and will terminate this agreement.

Management System

Content of Agreement

- No New Development on HCV, HCS and Peat
- No Exploitation of Local People or Labour Force

Content of Agreement

P a s a l - 7 **Jaminan Legalitas TBS**

1. Pihak Kedua menjamin serta menyatakan bahwa seluruh TBS yang dijual kepada Pihak Pertama adalah hasil produksi kebun milik pribadi Pihak Kedua
2. Pihak Kedua menjamin bahwa TBS yang dijual ke PKS milik Pihak Pertama adalah merupakan TBS yang LEGAL dan bukan hasil tindak pidana lainnya, dimana jika ditemukan TBS tersebut adalah merupakan TBS ilegal atau hasil tindak pidana lainnya, maka Pihak Pertama berhak menolak TBS tersebut yang dikirim dari Pihak Kedua, dan untuk itu Pihak Pertama dibebaskan dari tuntutan pidana dari pihak manapun, dan Pihak Pertama berhak memutuskan perjanjian jual beli ini.
3. Pihak Kedua menjamin bahwa TBS yang di jual ke pihak Pertama bukan bersumber dari kebun hasil perambahan kawasan hutan.
4. Pihak Kedua memberikan izin kepada Pihak Pertama untuk melakukan Verifikasi asal usul/sumber Buah (TBS) yang dijual ke PT. Sinarsiak Dianpermai – PKS Muda Setia apabila diperlukan oleh Perusahaan (+/- 6 bulan sekali)



WILMAR INTERNATIONAL PLANTATION

Excellent & Trustworthy

Head Office: Tower 13.15 JI Kuningan Raya Kav. 56, Guntur, Setiabudi, Kuningan - Jakarta Selatan 12000
Telp. 38280777

Kepada : Seluruh Manager PKS dan Divisi Pembelian TBS
 Dari : CEO WIP
 Nomor : 003/WIP-CEO/XI/2013
 Tanggal : 01 November 2013
 Perihal : **Standing Order Pembelian TBS**
 Tembusan : 1. GVA/FAA/RH
 2. RTH/RPTM
 2. Plantation Director
 3. PH Kalimantan & Sumatra
 4. GM/AGM/GEM WIP
 5. Seluruh Pimpinan OU
 6. Seluruh Pimpinan Department

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari Bp. Djumin per tanggal 12 November 2012 No. 002/TBS/int/XI/2012 dan tanggal 21 Oktober 2013 No.001/TBS-int/X/2013, dengan ini ditegaskan kembali standing order Management kepada seluruh Manager PKS dan Divisi Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) yang tergabung dalam kelompok usaha Wilmar Group:

1. Bahwa tidak dibenarkan melakukan Pembelian TBS dari penjual yang kebunnya berada dan atau diduga berada pada areal yang ditetapkan sebagai kawasan hutan.
2. Bahwa tidak dibenarkan melakukan Pembelian TBS ilegal dari pihak manapun juga. Termasuk dalam kategori TBS ilegal yaitu TBS yang tidak jelas asal usulnya, buah curian ataupun titipan dari pihak pekebun maupun agent yang tidak memiliki perijinan lengkap atau menyalahi aturan pemerintah.
3. Bahwa setiap TBS yang diperjualbelikan adalah TBS legal, dan untuk mendukung hal tersebut maka setiap transaksi jualbeli TBS harus dibuat dalam perjanjian yang jelas dan tegas dengan seluruh pihak penjual TBS tanpa terkecuali.
4. Bahwa pelanggaran terhadap standing order ini sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab pribadi pelaku.

Demikian standing order ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



GEM Ind. Sing

	STANDARD OPERATING PROCEDURE		Page: 1 of 6
	PEMBELIAN TANDA BUAH SEGAR KELAPA SAWIT (TBS)		NO DOKUMEN : 001/TBS/IV/2014
Wilmar Group	Tanggal Efektif : 02 JUN 2014	Revisi: - 3 -	Tanggal Revisi : 17 April 2014
Diperiksa	Disetujui		Disahkan
 Lim Teck Liu Commercial TBS-POM Div. Head	 Memed Kosasih HRGA Division Head	 Djumin Dir. TBS-POM	 Ricky Hermanto Dir. Finance & Admin

- Do not Buy any FFB from any source that is suspected to come from illegal land such as Forest Reserve.
- Do not Buy any FFB from any illegal source. An Illegal Source is defined as FFB from undefined source, suspected stolen crop or from unlicensed buying Agent or farms
- Any Contravention of this standing order will be dealt with accordingly

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Orang perseorangan/Korporasi yang dengan sengaja:

a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b;

dan/atau **Farming**
b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat

Perseorangan 3 tahun – 10 tahun

Korporasi 8 tahun - 20 tahun

Imprisonment

pidana denda paling sedikit

Perseorangan - Rp1.5 miliar - Rp5. miliar (**USD 123k - USD 408**)

Korporasi - Rp20 miliar - Rp50 miliar (**USD 1.6 M - USD 4 M**)

Pasal 92 – Pasal 93

Orang perseorangan yang dengan sengaja: **Knowingly**

a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c; **Transport or received produce**

b. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau **Sell, posses, store**

c. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e. dipidana dengan pidana penjara

Buy, market or processed

Perseorangan 3 -10 tahun

pidana denda paling sedikit

Imprisonment

Perseorangan Rp1.5 miliar – Rp 5 miliar

(USD 123 K – USD 408)

Pasal 93

Orang perseorangan yang karena kelalaiannya: **Unknowingly**

a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c; **Transport or received**

b. menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau **Sell, posses, owned or store**

c. membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e

Buy, market or processed

dipidana dengan pidana penjara

Perseorangan - 1 tahun - 3 (tiga) tahun

Korporasi - 5 tahun – 15 tahun

} **Imprisonment**

dan pidana denda

Perseorangan Rp100 million – Rp 1 miliar (**USD 8 K - USD 82 K**)

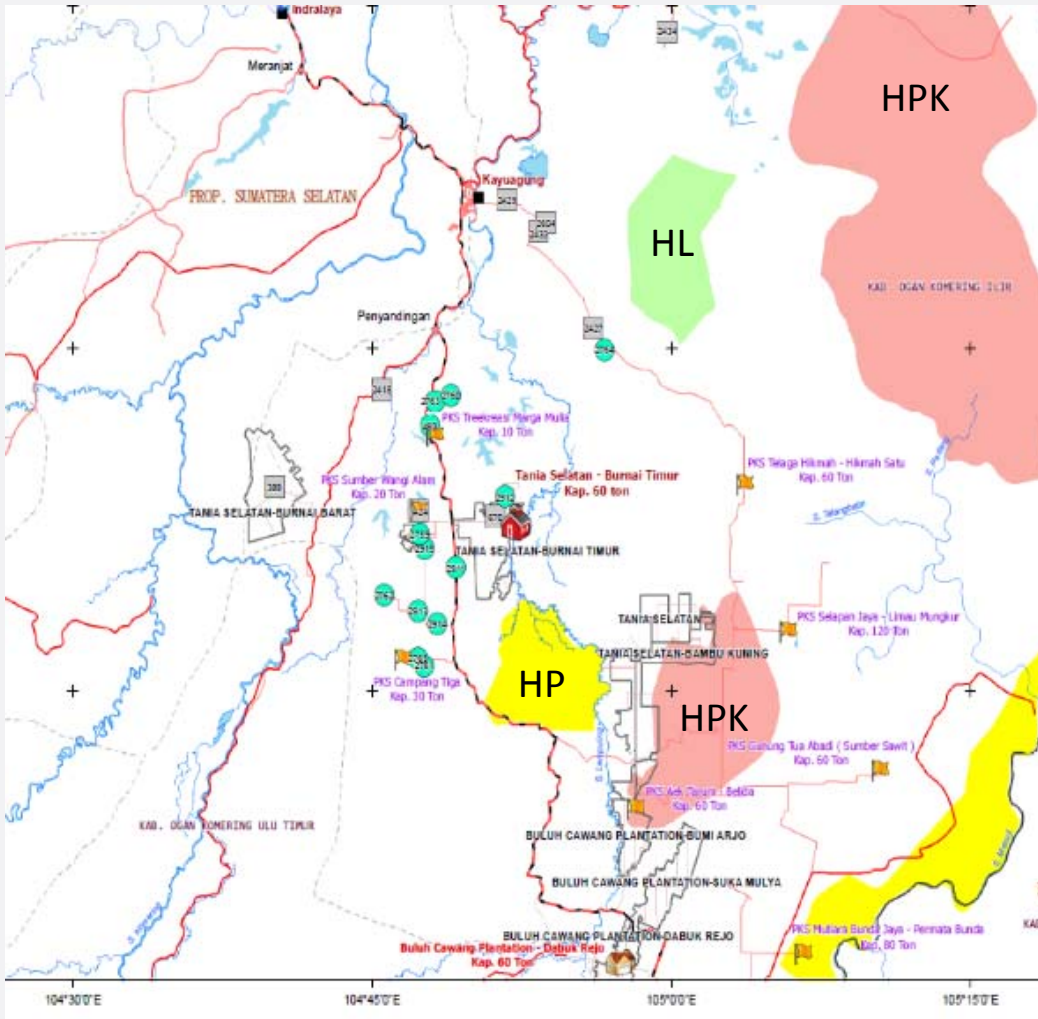
Korporasi - Rp5 miliar - Rp15 miliar (**USD 408K - USD 1.2 M**)

MONITORING

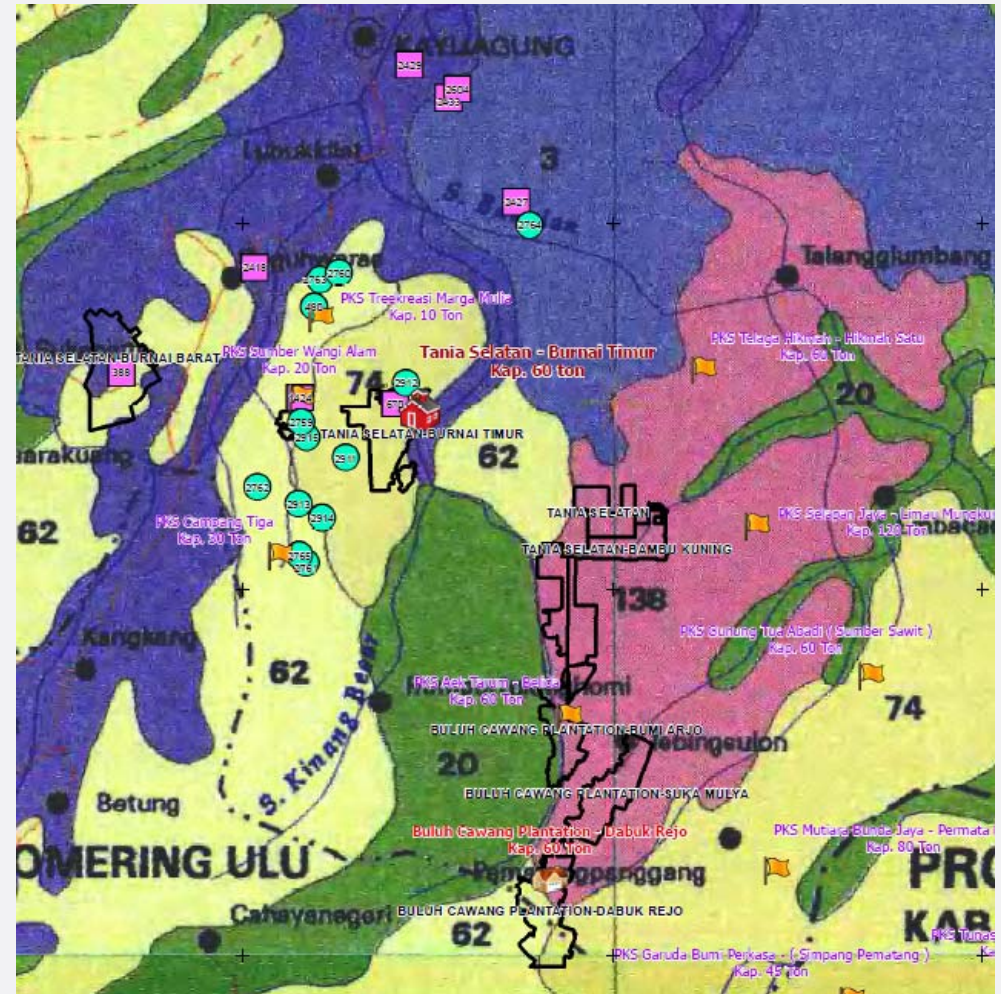
- Registration of suppliers in a data base. Information will include the following :
 - GPS Co-ordinates of the farm/estates/collection centers
 - Size of land holdings
 - Location of Landholdings (Village, Sub-district, district)
 - Land status
 - Soil type

- Overlay of GPS data onto RTRWP (Spatial Planning Map) & Soil Map. For Malaysia, we overlay with Locality Plan of the area and Soil Map

Overlay Supplier on to Spatial Planning Map



Overlay Supplier on to Soil Map



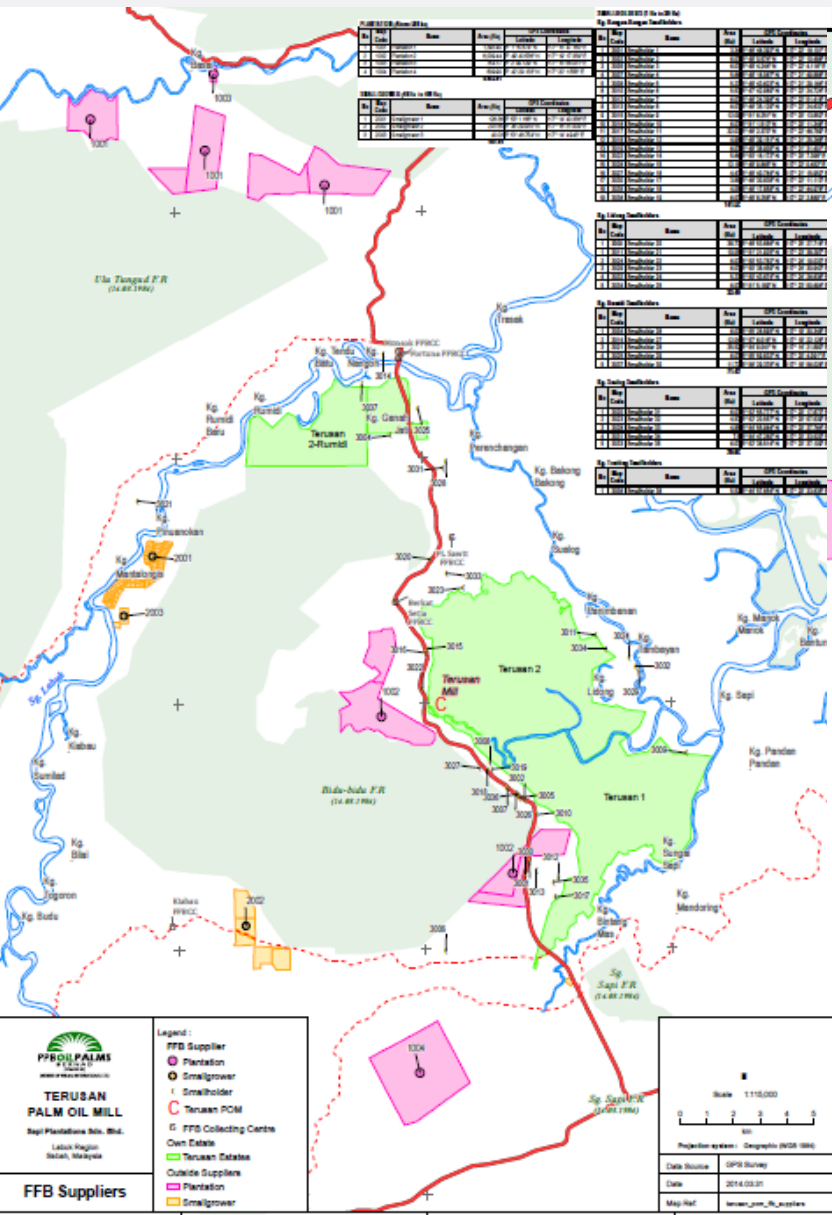
Source : Peta Sumber Daya Tanah Eksplorasi, Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat 2000

Company

No	PlantationID	Plantation Name	x_coor	y_coor	Status Survey	Province	Kabupaten	Place Name	Landbank (Ha)	STATUS	Jenis Tanah
1	670	Tania Selatan-Burnai Timur	104.85292	-3.62318	GPS	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir	Desa Muara Burnai, Kec. Lempuing	2405	APL	Non Gambut
2	1424	Warisan anak kaya	104.78826	-3.61902	GPS	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir	Ds. Sri Guna, Kec. Teluk Gelam & Kec. Tanjung Lubuk	2563	APL	Non Gambut
3	388	Tania Selatan-Burnai Barat	104.66801	-3.6017	GPS	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir	Ds. Ulak Kapal, Kec. Tanjung Lubuk	3200	APL	Non Gambut/Gc
4	2418	Sawit Pasti Gemilang	104.75783	-3.52979	GPS	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir	Kec. Tanjung Lubuk	80	APL	Gambut
5	2427	Seribu Daya	104.93452	-3.48507	GPS	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir	Kec. Pedamaran, Pampangan, Kota Kayu Agung	10000	APL	Gambut
6	2433	Perak Sakti	104.88904	-3.41448	GPS	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir	Ds.tanjung serang	3000	APL	Gambut
7	2604	Indah kayangan	104.89486	-3.40818	GPS	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir	Ds.Tanjung Serang Kec.Kayu Agung Kab. OKI	1000	APL	Gambut
8	2429	Bistari Sawii Lestari	104.86245	-3.39178	GPS	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir	Ds.Tanjung serang	2000	APL	Gambut
9	2434	Agro Manis Sakti	104.99638	-3.26877	GPS	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir	Ds.ulak depati kec.pampangan kab.oki	26000	APL	Gambut
10	2316	Anak Sejati Pahlawan	104.89245	-3.0322	GPS	Sumatera Selatan	Banyuasin	Kec. Rambutan	151	APL	Gambut

Scheme/Smallholders

No	PlantationID	Plantation Name	x_coor	y_coor	Status Survey	Province	Kabupaten	Place Name	Landbank (Ha)	STATUS	Jenis Tanah
1	2761	Tuah (Cempaka)	104.79279	-3.73174	GPS	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir	Kec. Cempaka	20	APL	Non Gambut
2	2765	Halimaton (Cempaka)	104.78802	-3.72652	GPS	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir	Kec. Cempaka	15	APL	Non Gambut
3	2914	Plasma Burnai Timur SP.2 - (Teluk Gelam)	104.80367	-3.70119	GPS	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir	Kec. Teluk Gelam	412	APL	Non Gambut
4	2913	Plasma Burnai Timur SP.3 - (Teluk Gelam)	104.78771	-3.69183	GPS	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir	Kec. Teluk Gelam	591	APL	Non Gambut
5	2762	Rosnah Kadir - (Gunung Batu)	104.75949	-3.68027	GPS	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir	Ds. Gunung Batu, Kec. Cempaka	10	APL	Non Gambut
6	2911	Plasma Buang Sayang - (Muara Burnai II)	104.81954	-3.66026	GPS	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir	Ds. Muara Burnai II, Kec. Lempuing Jaya	542	APL	Non Gambut
7	2915	Plasma Burnai Timur SP.1 - (Teluk Gelam)	104.79325	-3.64647	GPS	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir	Kec. Teluk Gelam	1190	APL	Non Gambut
8	2759	Siswanto - (Benawa)	104.78926	-3.63603	GPS	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir	Ds. Benawa, Kec. Teluk Gelam	6	APL	Non Gambut
9	2912	Plasma Burnai Timur SP.4 - (Burnai Timur)	104.86037	-3.60856	GPS	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir	Ds. Burnai Timur, kec. Pedamaran	674	APL	Non Gambut
10	480	Lydia - (Pedamaran)	104.79811	-3.55658	GPS	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir	Ds. Pedamaran, Kec. Pedamaran	8	APL	Non Gambut
11	2763	Agusi - (Suka Pulih)	104.80223	-3.5384	GPS	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir	Ds. Suka Pulih, Kec. Pedamaran	13	APL	Non Gambut
12	2760	Muliyono - (Mulya Guna)	104.81514	-3.5338	GPS	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir	Ds. Mulya Guna, Kec. Teluk Gelam	15	APL	Non Gambut
13	2764	Nawasi - (Pedamaran)	104.94365	-3.5011	GPS	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir	Kec. Pedamaran	22	APL	Gambut



PLANTATION (Above 500 ha)

No	Map Code	Name	Area (Ha)	GPS Coordinates	
				Latitude	Longitude
1	1001	Plantation 1	1,393.40	6° 1' 15.674" N	117° 15' 47.180" E
2	1002	Plantation 2	6,009.44	5° 49' 40.536" N	117° 19' 17.339" E
3	1003	Plantation 3	754.17	6° 2' 49.129" N	117° 15' 58.031" E
4	1004	Plantation 4	809.90	5° 42' 29.133" N	117° 20' 1.556" E
			8,966.91		

SMALLGROWER (40 Ha to 499 Ha)

No	Map Code	Name	Area (Ha)	GPS Coordinates	
				Latitude	Longitude
1	2001	Smallgrower 1	126.36	5° 53' 1.168" N	117° 14' 40.338" E
2	2002	Smallgrower 2	241.55	5° 45' 29.910" N	117° 16' 31.009" E
3	2003	Smallgrower 3	40.03	5° 51' 48.754" N	117° 14' 4.945" E

SMALLHOLDERS (1 Ha to 39 Ha)

Kg. Bangau-Bangau Smallholders

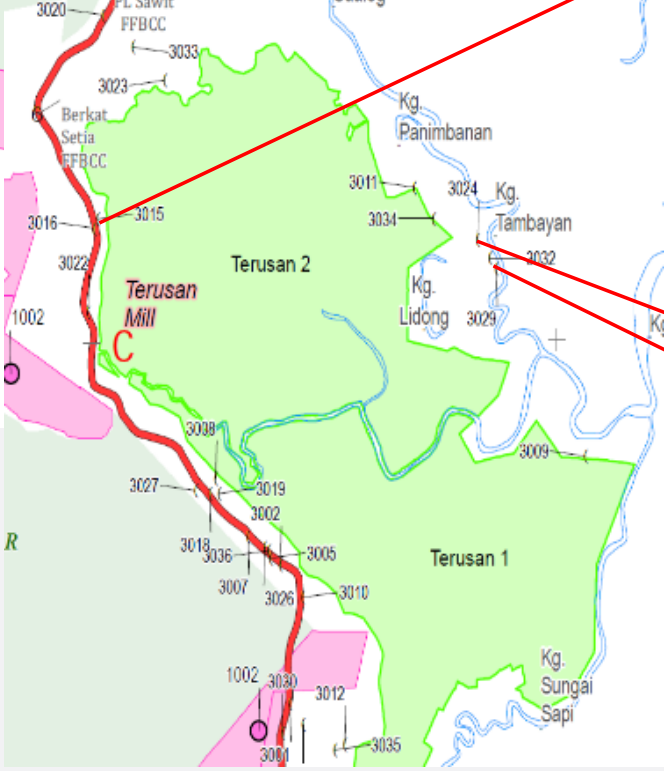
No	Map Code	Name	Area (Ha)	GPS Coordinates	
				Latitude	Longitude
1	3001	Smallholder 1	3.34	5° 46' 46.392" N	117° 22' 16.101" E
2	3002	Smallholder 2	6.07	5° 48' 0.574" N	117° 22' 10.486" E
3	3005	Smallholder 3	6.07	5° 48' 4.244" N	117° 22' 4.116" E
4	3007	Smallholder 4	5.66	5° 48' 16.067" N	117° 21' 49.886" E
5	3008	Smallholder 5	5.23	5° 48' 43.623" N	117° 21' 29.164" E
6	3010	Smallholder 6	5.53	5° 47' 42.989" N	117° 22' 24.724" E
7	3012	Smallholder 7	6.07	5° 46' 24.396" N	117° 22' 51.416" E
8	3013	Smallholder 8	6.07	5° 46' 35.129" N	117° 22' 24.632" E
9	3015	Smallholder 9	12.09	5° 51' 6.251" N	117° 20' 13.852" E
10	3016	Smallholder 10	6.07	5° 51' 1.513" N	117° 20' 11.346" E
11	3017	Smallholder 11	32.03	5° 46' 2.370" N	117° 22' 46.789" E
12	3018	Smallholder 12	4.95	5° 48' 39.151" N	117° 21' 25.268" E
13	3019	Smallholder 13	6.07	5° 48' 38.905" N	117° 21' 31.401" E
14	3022	Smallholder 14	5.66	5° 50' 16.172" N	117° 20' 7.398" E
15	3026	Smallholder 15	12.18	5° 48' 9.865" N	117° 22' 0.452" E
16	3027	Smallholder 16	4.47	5° 48' 40.764" N	117° 21' 15.952" E
17	3030	Smallholder 17	3.88	5° 46' 30.838" N	117° 22' 11.113" E
18	3035	Smallholder 18	4.05	5° 46' 17.858" N	117° 22' 44.976" E
19	3036	Smallholder 19	6.07	5° 48' 8.258" N	117° 22' 2.889" E

141.56

Kg. Lidong Smallholders

No	Map Code	Name	Area (Ha)	GPS Coordinates	
				Latitude	Longitude
1	3009	Smallholder 20	38.77	5° 48' 53.886" N	117° 25' 27.716" E
2	3011	Smallholder 21	10.05	5° 51' 21.925" N	117° 23' 38.297" E
3	3024	Smallholder 22	6.07	5° 50' 53.782" N	117° 24' 19.033" E
4	3029	Smallholder 23	6.07	5° 50' 38.459" N	117° 24' 30.943" E
5	3032	Smallholder 24	5.23	5° 50' 43.874" N	117° 24' 26.836" E
6	3034	Smallholder 25	6.07	5° 51' 5.189" N	117° 23' 50.694" E

33.49



Risk Assessments of Mills and Supply Base

The core environmental issues faced by palm oil mills are related to conversion of High Carbon Stock (HCS) forests, peatlands, and High Conservation Value (HCV) areas. The desktop assessment of risks of unwanted environmental outcomes is divided into two phases:

- 1) An assessment of the mill's Fresh Fruit Bunch (FFB) catchment area and its **proximity to national and international protected areas, unprotected** areas that are recognised as containing a **biodiversity value, peat soils** and land cover disturbance sites. Palm oil mills whose predicted catchment area includes one or more of the above aspects may warrant further investigation/ground assessments of its FFB suppliers.
- 2) An evaluation of mitigating factors which might increase or decrease the risk of conversion of areas identified in step 1, or the risk of the existing disturbance being associated with the mill's own FFB sources. Various factors, including the establishment date of the mill and sustainability certification, can indicate a lower or higher risk of undesirable practices.

Risk Assessment of Palm Oil Mills

Data Set	Layer	Score	Weight out of 10 points
IUCN/MoF Protected Areas	Protected Area (MoF)	If the mill catchment overlaps then '1.0', else zero	2.0
Protected Forest (Hutan Lindung)	Hutan Lindung	If the mill catchment overlaps then '1.0', else zero	1.0
Key Biodiversity Areas (KBA)	Endemic Bird Area (Kalimantan) & Kehati Key Biodiversity Area (Sumatera)	If the mill catchment overlaps then '1.0', else zero	2.0
Forest Disturbance Site Inside a IUCN Protected Area or KBA	The Global Forest Disturbance Alert System	If the mill catchment overlaps then '1.0', else zero	2.5
Forest Disturbance site Outside IUCN Protected Area or KBA	The Global Forest Disturbance Alert System	If the mill catchment overlaps then '1.0', else zero	1.0
Peat soil	Peat Soil (Wetland)	If the mill catchment overlaps then '1.0', else zero	1.5
TOTAL			10

Risk Assessments of Mills and Supply Base

- Mill with high percentage of outside crop ($> 60\%$) forming its supply based are consider to be high risk.
- Suppliers that are RSPO certified are considered to be of lower risk

Ground Monitoring And Awareness training

- Patrolling and Networking with suppliers
- Monitoring of FFB received against Size of land.
- Awareness training and getting them to be RSPO certified

Partnership with Wildasia, IDH and Wilmar to Certify Independent Smallholders



MoU Signing With Wild Asia



MoU Signing with IDH



FFB Quality and Pricing Training



Engaging with Small Producers



Engaging with Small holders



Managing Schedule Waste with smallholders

SAVING THE FOREST WHILE IMPROVING SMALLHOLDERS

RSPO CERTIFICATION

- Commit Not to Clear HCV/HCS forest
- Commit not to burn
- Commit to Legal Practices (NO Forest Encroachments)
- Commit to implement best management practices- Yield Improvement- Better Livelihood.



Implement- BMP- Improved Livelihood



No Burning



No Forest Encroachment

thank you

